**Bulan :**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 7 |

**SUBBAGIAN HUMAS**

**Tanggal :**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Suara Merdeka | Jateng Pos | Jawa Pos | Media Indonesia | Wawasan |
| Tribun Jateng | Metro Jateng | Republika | Kompas | Media Online |

**Wilayah Berita : BPK Pusat**

Halaman 1

# BPK Audit Alutista TNI

*Sebelumnya, BPK sebagai auditor negara selalu dilarang untuk memeriksa seluruh aset senjata yang memiliki nilai sekitar Rp23 triliun.*

RUDY POLYCARPUS
rudy@mediaindonesia.com

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun ini mulai melakukan audit terhadap pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI yang dilakukan Kementerian Pertahanan.

Sebelumnya, dengan alasan untuk menjaga kerahasiaan negara, BPK sama sekali tidak diperkenankan melakukan audit terhadap pengadaan alutsista tersebut.

Hal itu dikemukakan anggota BPK Harry Azhar Azis seusai mendampingi Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara melaporkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2017 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

"Audit (alutsista) masih berjalan. Kami memilah-milah mana (data) yang kategori rahasia negara. Sebelumnya, ada larangan dari Panglima TNI atau Kemenhan agar kami tidak memeriksa aset senjata yang nilainya sekitar Rp23 triliun," kata Harry.

Menurut mantan politikus Partai Golkar itu, apabila auditor BPK tidak diperbolehkan memeriksa aset negara, kelak dapat menimbulkan opini *disclaimer*. Presiden dan Menkeu akhirnya menerima penjelasan BPK tersebut. "Bila ada hal menyangkut rahasia negara, BPK tidak memublikasikannya. Pelaporannya kami buat sedemikian rupa sehingga tidak terbuka kerahasiaannya."

Ihwal audit terhadap alutsista itu berawal dari pengadaan helikopter AW101 senilai US$55 juta (Rp742 miliar) di awal tahun ini. Dalam sebuah rapat dengan Komisi II DPR, baik Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo maupun Menhan Ryamizard Ryacudu saling mengklaim tidak tahu-menahu pembelian helikopter yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp220 miliar tersebut.

Harry mengatakan hasil audit terhadap aset negara bisa saja menemukan pelbagai penyimpangan. "Hanya implikasi. Kami tidak dapat memastikan ada atau tidaknya (penyimpangan)."

## Kontrol negara

Saat menanggapi soal audit terhadap alutsista itu, Direktur Imparsial Al Araf menilai selama ini pengadaan peralatan amat strategis itu bak terjadi di ruangan gelap yang sarat dengan praktik patgulipat anggaran dan sulit disentuh penegak hukum.

"Oleh karena itu, Presiden harus mengembalikan kontrol pengadaan alutsista itu kepada negara."

> "Perbekalan itu salah satu yang harus diaudit. Banyak orang selalu *ignore* padahal ini besar. Setelah itu baru audit Mabes TNI."
>
> **Connie Rahakundini**
> Pengamat kemiliteran

Pengamat kemiliteran Connie Rahakundini Bakrie justru mempertanyakan *legal standing* BPK mengaudit pengadaan alutsista di Kemenhan tersebut.

"Berdasarkan info, BPK mengaudit atas permintaan Panglima TNI. Ini lucu. Apa kaitannya panglima sebagai kuasa pengguna anggaran meminta pengguna anggarannya diaudit?" ungkap Connie serius.

Keinginan bersih-bersih yang digaungkan, lanjut Connie, seharusnya dimulai TNI. "Perbekalan itu salah satu yang harus diaudit. Banyak orang selalu *ignore* padahal ini besar. Setelah itu baru audit Mabes TNI."

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem Supiadin AS mengakui audit BPK terhadap alutsista sah-sah saja. "BPK berhak mengaudit untuk melihat kerugian. Hanya, perlu diterangkan soal resistensi Panglima dan Menhan sehingga BPK mendapat izin audit dari Presiden."

Menhan Ryamizard Ryacudu sekali lagi meminta institusi yang terlibat polemik pembelian senjata membuang jauh-jauh ego demi keutuhan NKRI. "Saya prihatin atas polemik (senjata) karena telah menjadi tontonan publik." (Ric/Faw/X-3)